

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Yulius Kurnia Susanto

yulius@tsm.ac.id

Daves Joshua

STIE Trisakti

ABSTRACT

The purpose of this study was to get empirical evidence about the effect of corporate governance and firm characteristic on corporate social responsibility disclosure. The corporate governance include board size, board independent, audit committee, ownership concentration, foreign ownership and public ownership. The firm characteristic include firm size, leverage, firm age, type of industry and profitability. Sample of this study consisted of 690 data from 179 non finance companies listed in Indonesia Stock Exchange from 2011 to 2014 and selected by purposive sampling method. Data were analyzed by multiple regression analysis. The results showed that board independent, audit committee, ownership concentration, public ownership, firm size and type of industry have an effect on corporate social responsibility disclosure. While the board size, foreign ownership, leverage, firm age and profitability have no effect on corporate social responsibility disclosure. The better the corporate governance, the control and supervision of management to disclose information about corporate social responsibility is increasing. The bigger the company, the greater the demand for the company to disclose information about corporate social responsibility.

Key words: corporate social responsibility disclosure, board independent, audit committee, ownership concentration, public ownership

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Tata kelola perusahaan meliputi ukuran komisaris, komisaris independen, komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan asing dan kepemilikan publik. Karakteristik perusahaan meliputi ukuran perusahaan, *leverage*, umur perusahaan, jenis industri dan profitabilitas. Sampel penelitian terdiri dari 690 data dari 179 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 2011 sampai 2014 dan dipilih dengan metode *purposive sampling*. Data tersebut dianalisis dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan publik, ukuran perusahaan dan jenis industri memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ukuran komisaris, kepemilikan asing, *leverage*, umur perusahaan dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin baik tata kelola perusahaan, maka pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen untuk mengungkapkan informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan semakin meningkat. Semakin besar perusahaan, semakin besar tuntutan terhadap perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

Kata kunci: pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, komisaris independen, komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan publik

PENDAHULUAN

Pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan paradigma baru dalam pembangunan berkelanjutan. Sejak 1980an, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi konsep pembangunan di berbagai negara. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah membangun untuk saat ini tanpa mengorbankan kepentingan di masa yang akan datang (Burritt dan Lehman, 1995). Pembangunan berkelanjutan dapat tercapai apabila aksi pembangunan selain mengejar kepentingan ekonomi, juga memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan.

Keberadaan bisnis di tengah masyarakat tentu membawa dampak yang baik. Lapangan kerja tercipta dan pertumbuhan ekonomi pun bisa terlaksana. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak aktivitas bisnis perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan, mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia (Dewi dan Keni, 2013).

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, telah terjadi peningkatan dalam kesadaran publik mengenai peraturan dan tanggung jawab dari perusahaan dalam masyarakat (Hackston dan Milne, 1996). Oleh karena itu, banyak perusahaan yang memulai untuk pengungkapan aktivitas pertanggungjawaban sosialnya (*Corporate Social Responsibility-CSR*). Banyak sekali perusahaan besar dan lebih tua menginvestasikan usaha dan uang mereka yang cukup besar untuk pengungkapan informasi dalam pelaksanaan CSR mereka. Perusahaan menggunakan laporan tahunan sebagai alat untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial serta dijadikan sebagai sarana komunikasi untuk meningkatkan perhatian publik terhadap perusahaan (Ponnu dan Maurice, 2009). Selain kinerja keuangan, laporan tahunan juga mengungkapkan kinerja non keuangan perusahaan yang juga penting bagi stakeholders (Sriayu dan Mimba, 2013). Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lainnya

sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya (Sriayu dan Mimba, 2013).

Menurut Sari (2012), perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada para pemilik (*shareholder*) dengan sebatas pada indikator ekonomi (*economic focused*) namun bergeser menjadi lebih luas yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholder*) dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial (*social dimensions*). Beberapa pihak juga berpendapat bahwa pengambilan keputusan ekonomi sangat tidak relevan apabila hanya melihat informasi keuangan perusahaannya saja (Sriayu dan Mimba, 2013). Selain itu, banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar membuat pembahasan mengenai CSR berkembang dengan pesat, misalnya seperti kasus Lapindo yang cukup hangat dibicarakan akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, kontribusi dan penyingkapan bervariasi sesuai dengan sektor industri (Bayoud *et al.*, 2012; Hackston & Milne, 1996; McGuire *et al.*, 2003). Sebagai contoh, perusahaan dalam sektor minyak lebih memperhatikan permasalahan lingkungan, sementara perusahaan dalam sektor makanan lebih fokus terhadap aktivitas CSR berhubungan dengan kesehatan dan makanan. Selain itu, banyak hal-hal lain yang kemungkinan dapat mempengaruhi penyingkapan CSR perusahaan, yaitu karakteristik-karakteristik perusahaan (seperti *leverage*, ukuran perusahaan dan profitabilitas).

Sudah banyak kasus pencemaran lingkungan yang terjadi akibat aktivitas bisnis perusahaan. Salah satu kasus adalah pencemaran lingkungan di Teluk Buyat oleh PT Newmount Minahasa Raya yang terjadi pada tahun 2004 lalu. Kasus lain adalah kasus enzim babi PT Ajinomoto dan kasus PT Lapindo yang sampai saat ini belum juga rampung penyelesaiannya (Utami dan Prastiti, 2011). Dampak dari pencemaran lingkungan ini cukup serius bagi masyarakat sekitarnya, seperti halnya pada kasus PT Lapindo, tidak kurang dari 8 desa yang tenggelam akibat semburan lumpur ter-

sebut. Pada 2011, PT Nagamas Palmoil Lestari membuang limbah cair ke laut Dumai. Kasus pencemaran Sungai Cikijing di Bandung yang dilakukan tiga perusahaan tekstil, yaitu PT KHT II, PT ISIT dan PT FST. Selain masalah lingkungan, perusahaan mengalami konflik dengan serikat pekerja. Kebanyakan konflik tersebut berhubungan dengan upah minimum dan metoda *outsourcing* yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan.

Adanya tuntutan dari *shareholder* dan *stakeholder*, pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan hal yang wajib bagi perusahaan (Khan *et al.*, 2013). Tanggung jawab sosial perusahaan dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan dan laporan sosial terpisah (Dewi dan Keni, 2013).

Pelaksanaan aktivitas tanggung jawab sosial terkait erat dengan penerapan *corporate governance*. Pelaksanaan tanggung jawab sosial berkaitan dengan salah satu prinsip *corporate governance*, yaitu *responsibility* (Sudana dan Arlindania, 2011). Dalam hal ini, perusahaan diwajibkan untuk bertanggung jawab atas segala keputusan yang dapat memberikan dampak kepada lingkungan sosial mereka. Karakteristik *corporate governance* yang seringkali dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah komisisaris independen (*board independence*). Proporsi komisisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Rouf, 2011; Khan *et al.*, 2013; Santioso dan Chandra, 2012).

Terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, prinsip *corporate governance* yang sejalan dengan aktivitas pengungkapan ini adalah prinsip *transparency* (Sudana dan Arlindania, 2011). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 66, dalam laporan tahunan perusahaan juga dituntut untuk mengungkapkan ke-

giatan tanggung jawab sosial. Penerapan *corporate governance* dan pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal itu menyebabkan cukup banyak penelitian yang menghubungkan antara *corporate governance* dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka penelitian ini cukup penting untuk dilakukan, karena pengungkapan CSR merupakan tanggung jawab dan harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan, dengan menggunakan acuan utama dari Ali dan Atan (2013). Perbedaan-perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: (1) Seluruh variabel kontrol sebagai variabel independen; (2) Menambah variabel independen yaitu ukuran komite audit, umur perusahaan, jenis industri, kepemilikan asing, kepemilikan publik dan profitabilitas. Variabel-variabel tersebut ditambahkan dari Bayoud *et al.* (2012), Sriayu dan Mimba (2013) dan Iswandika *et al.* (2014); (3) Obyek penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang ada di Indonesia, sedangkan obyek penelitian sebelumnya adalah perusahaan di Malaysia yang memperoleh penghargaan ACCA Malaysia *Environmental and Social Reporting Awards* (ACCA MESRA) dan *Prime Minister's CSR Awards*, dan perusahaan global dari *The Global Reporting Initiative* (GRI).

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Tata kelola perusahaan meliputi ukuran komisisaris, komisisaris independen, komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan asing dan kepemilikan publik. Karakteristik perusahaan meliputi ukuran perusahaan, *leverage*, umur perusahaan, jenis industri dan profitabilitas. Penelitian ini disusun dengan urutan penulisan sebagai berikut. Penelitian ini diawali dengan pendahuluan yang men-

jelaskan latar belakang masalah, tujuan penelitian, teori dan hasil penelitian sebelumnya sebagai dasar pengembangan hipotesis. Kedua, metode penelitian yang terdiri dari pemilihan sampel dan pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel. Ketiga, hasil penelitian dan pembahasan. Keempat, simpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Keagenan

Salah satu yang mempengaruhi luasnya pengungkapan sukarela perusahaan, dimana pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu di dalamnya, adalah penerapan *corporate governance*. *Corporate governance* didefinisikan sebagai sistem yang mengarahkan serta mengendalikan suatu perusahaan (Garrison *et al.*, 2011). Dalam struktur *corporate governance*, telah dispesifikasikan pembagian hak dan tanggung jawab dari setiap pihak yang ada dalam perusahaan, seperti dewan komisaris, manajemen perusahaan, *shareholder* dan *stakeholder* (Hodgetts *et al.*, 2009).

Beberapa teori telah menghubungkan antara pengungkapan tanggung jawab sosial dan penerapan *corporate governance*, salah satunya adalah teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen perusahaan merupakan agen dari *shareholder* dan *stakeholder* yang bertindak sebagai prinsipal (Sari, 2012). Manajemen perusahaan sebagai agen perlu untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kondisi perusahaan kepada principal (Untoro dan Zulaikha, 2013). Pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan manajemen perusahaan dengan tujuan mendapatkan penilaian positif dari prinsipal berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan (Utami dan Prastiti, 2011).

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab (Sari, 2013).

Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap *shareholder* sebagai penanam modal dalam perusahaan, namun masih banyak pihak terkait yang berhak menerima pertanggung jawaban dari pihak perusahaan. Pihak lain tersebut antara lain karyawan perusahaan, masyarakat sekitar, konsumen dan lain-lain yang berhubungan secara langsung maupun tidak secara langsung dengan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan tidak dapat hanya berfokus pada memaksimalkan kinerja untuk memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya, namun perusahaan harus berfokus pada pihak-pihak lain yang terkait.

Kesadaran perusahaan akan tanggung jawabnya membuat perusahaan mengalihkan fokus dari *shareholder focused* menjadi *stakeholder focused*. Perusahaan tidak hanya berfokus untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya saja, namun perusahaan juga terdorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi *stakeholder* meskipun hal tersebut akan mengurangi keuntungan perusahaan. Kegiatan tersebut dapat berupa program *corporate social responsibility*. Melalui program *corporate social responsibility*, diharapkan dapat mengurangi dampak buruk perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan *stakeholder*.

Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lainnya sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya. *Stakeholder* terdiri dari pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lainnya. Teori *stakeholder* berpendapat bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada para pemegang saham (*shareholder*), namun juga harus bertanggung jawab kepada anggota-anggota *stakeholder* lainnya (Sriayu dan Mimba, 2013).

Teori Legitimasi

Legitimasi perusahaan merupakan sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat

(Sriayu dan Mimba, 2013). Perusahaan menganggap bahwa masyarakat (*society*) merupakan sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*). Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat, perusahaan harus selaras dengan harapan yang diinginkan masyarakat. Teori legitimasi mencakup gagasan tentang kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat, jika masyarakat merasa bahwa perusahaan telah melanggar isi dari kontrak tersebut, maka kelangsungan hidup organisasi akan terancam (Jupe, 2005).

Teori yang berhubungan dengan pengukapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah teori legitimasi. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial hanya untuk memenuhi kewajiban yang diterapkan pemerintah dan hanya sebagai persyaratan. Dengan dijalanannya kewajiban tersebut, perusahaan berharap akan mendapat pengakuan dan penerimaan dari masyarakat.

Perusahaan berada di tengah masyarakat dan merupakan bagian daripadanya, perlu untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara keduanya (Untoro dan Zulaikha, 2013). Kegagalan perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat, melanggar batasan norma dan adat yang diterima masyarakat, akan mengancam legitimasi perusahaan dan pada akhirnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Utami dan Prastiti, 2011).

Teori Keberlanjutan Perusahaan

Menurut teori ini, agar dapat bertahan hidup dan bertumbuh secara berkelanjutan maka perusahaan harus mengintegrasikan tujuan bisnis dengan tujuan sosial dan ekologi secara utuh (Lako, 2011). Pembangunan bisnis harus berlandaskan tiga pilar utama yaitu ekonomi, sosial, lingkungan serta tidak mengorbankan kepentingan generasi-generasi berikutnya. Hal ini menyebabkan beralihnya fokus perusahaan dari laporan keuangan saja (*single bottom line*)

untuk mendapatkan laba dan rasio-rasio keuangan yang terbaik menjadi fokus pada *triple bottom lines*, yaitu "*People-Planet-Profit*". People yang dimaksud di sini adalah setiap orang yang memiliki hubungan dengan perusahaan, baik hubungan secara langsung maupun hubungan secara tidak langsung. Planet merupakan alam sekitar, setiap kegiatan dimulai oleh input lalu proses dan terdapat hasil. Secara keseluruhan dari kegiatan tersebut memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar, oleh karena itu perusahaan seharusnya memiliki kepedulian dari setiap proses kegiatan yang dilakukan, baik melalui pemilihan *input*, pengerjaan maupun *output* yang dihasilkan. Misalkan memilih input yang tidak merusak lingkungan, proses yang tidak mencemari lingkungan dan menghamburkan sumber daya alam, maupun output yang tidak membahayakan lingkungan dan konsumen. Profit merupakan salah satu tujuan utama dari pembentukan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan tetap harus mendapatkan profit agar perusahaan tersebut dapat tetap maju dan berkembang.

Berdasarkan teori ini maka perusahaan harus memiliki keseimbangan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak terjadi kerugian pada satu pihak tertentu atau pada generasi yang akan datang. Jika ada pihak yang merasa dirugikan maka pihak tersebut dapat melakukan perlawanan terhadap perusahaan dalam berbagai bentuk seperti demo, mogok kerja, berkurangnya loyalitas karyawan pada perusahaan, atau pelaporan kepada aparat negara. Jika hal tersebut terjadi maka keberlangsungan perusahaan akan terancam atau perusahaan tidak mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu perusahaan perlu memiliki dan melaksanakan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan agar dapat bertahan hidup dan bertumbuh secara berkelanjutan.

Teori Kontrak Sosial

Lako (2011) menyatakan bahwa adanya perusahaan dalam suatu area karena

didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang merupakan perwakilan dari masyarakat. Masyarakat dapat menjadi biaya dan manfaat bagi keberlanjutan perusahaan. CSR merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat sukarela. Teori kontrak sosial muncul karena adanya hubungan sosial masyarakat agar terjadi keselarasan, keserasian dan keseimbangan. Kontrak sosial merupakan suatu perjanjian antara perusahaan dan masyarakat, karena adanya keuntungan yang diterima dari kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan masyarakat sekitar. Perusahaan dapat menjalankan operasi bisnisnya dan masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan dari adanya perusahaan.

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah proses komunikasi antara perusahaan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan atau tidak atas kegiatan operasional perusahaan serta efek yang ditimbulkan dan bagaimana penanganan yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan dampak tersebut (Oktariani, 2013). Keberlanjutan sebuah perusahaan ditentukan oleh aspek sosial dan lingkungan, bukan hanya ditentukan oleh keuntungan bisnis (Rahmatullah dan Kurniati, 2011).

Mengacu pada ISO 26000, tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis, yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan *stakeholder*, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. Saat ini, pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah hal yang wajib dilakukan perusahaan

dan merupakan salah satu alat untuk meningkatkan nilai perusahaan (Sudana dan Arlindania, 2011).

Tanggung jawab sosial didefinisikan sebagai sebuah konsep yang mana organisasi mempertimbangkan kebutuhan *stakeholder* pada saat pengambilan keputusan (Garrison *et al.*, 2011). Keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab sosial akan menghasilkan siklus positif pada *outside stakeholders*, tatanan efektivitas produk atau jasa sehingga akan diperoleh kinerja berlanjut (Santioso dan Chandra, 2012). Keberhasilan pelaksanaan ini perlu diungkapkan perusahaan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan citra perusahaan di masyarakat, khususnya *investor* (Sudana dan Arlindania, 2011).

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok yang berkepentingan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen yang berkelanjutan sebagai bentuk etis perusahaan dan berkontribusi bagi perkembangan ekonomi khususnya bagi masyarakat sekitar. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk pelaporan perusahaan atas dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan. Perusahaan melakukan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Keberpihakan dari masyarakat ini merupakan salah satu faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka kelangsungan hidup perusahaan (Sari, 2012). *Strategic philanthropy* menyebutkan bahwa bisnis dan sosial merupakan suatu hal yang tidak saling terkait (Porter dan Kramer, 2006). Di Indonesia sendiri, telah hadir beberapa regulasi yang mengatur tentang pengungkapan tanggung jawab sosial yang wajib dilakukan oleh perusahaan. Regulasi ini dibuat karena kurangnya kesadaran perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial mereka (Dewi dan Keni, 2013). Dalam pasal 66 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan direksi kepada rapat umum pemegang saham (RUPS). Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kewajiban untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dimuat dalam laporan tahunan dan nantinya akan dipertanggungjawabkan dalam RUPS.

Pengungkapan tanggung jawab sosial termasuk dalam kategori pengungkapan sukarela (Rahman dan Widiyarsari, 2008). Perusahaan mempunyai keleluasaan dalam menentukan luasnya pengungkapan yang akan disajikan. Tanggung jawab sosial perusahaan bersifat sukarela dan tergantung dengan komitmen dan kemampuan keuangan perusahaan.

Ukuran Komisaris dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajemen

perusahaan (Sriayu dan Mimba, 2013). Dalam mengungkapkan CSR, perusahaan memerlukan pengawasan. Jumlah anggota dewan komisaris (board size) yang semakin besar akan menyebabkan pengendalian terhadap CEO semakin mudah dan efektif, sehingga pihak manajemen akan mendapatkan tekanan yang semakin besar dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaannya (Sembiring 2005).

Sembiring (2005) serta Untoro dan Zulaikha (2013) menemukan bukti bahwa dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini dikarenakan dewan komisaris yang semakin besar akan meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan tekanan terhadap manajemen perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Sembiring, 2005). Semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin besar pula pengungkapan CSR. Hipotesis yang digunakan adalah:

H_1 : Ukuran komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Komisaris Independen dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut UU nomor 40 tahun 2007 pasal 108 tentang Perseroan Terbatas, komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasehat yang diperlukan. Fungsi utama dewan komisaris menurut *Indonesian Code for Corporate Governance* adalah memberikan supervisi kepada direksi dalam menjalankan tugasnya. Komisaris independen (*Board Independent*) merupakan anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham.

Sama halnya dengan ukuran dewan komisaris, penelitian yang menghubungkan komisaris independen dengan pengungkapan tanggung jawab sosial juga menunjukkan hasil yang beragam. Komisaris inde-

penden berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Rouf, 2011; Santioso dan Chandra, 2012; Khan *et al.*, 2013). Semakin banyak komisaris independen dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan (Ali dan Atan, 2013). Dengan meningkatnya pengawasan terhadap laporan keuangan, maka akan ada konsiderasi antara manajemen dan komisaris independen dalam membuat keputusan khususnya yang berhubungan dengan CSR. Hal ini juga didukung oleh Ali dan Atan (2013), yang mengatakan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab sosial akan memiliki lebih banyak anggota komisaris independen daripada perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial. Jadi, semakin besar ukuran komisaris independen dalam perusahaan, semakin besar pula pengungkapan CSR. Hipotesis yang digunakan adalah:

H₂ : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Komite Audit dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Komite audit adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Keempat faktor inilah yang membuat laporan keuangan menjadi lebih berkualitas (Sriayu dan Mimba, 2013). Komite audit akan secara efektif mengawasi manajemen dan hasilnya akan meningkatkan kinerja dan pengungkapan perusahaan, bila pimpinan komite audit bersifat independen dari manajemen. Independensi dari komite audit akan mempengaruhi objektivitas dan independensi dari auditor eksternal (Ali dan Atan, 2013).

Fungsi komite audit dalam mekanisme *corporate governance* adalah sebagai fasilitator dewan komisaris yang memastikan bahwa manajemen perusahaan telah menjalankan bisnis perusahaan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan (Untoro dan Zulaikha,

2013). Selain itu, komite audit juga bertugas untuk memantau proses pengendalian internal perusahaan dan proses penyediaan laporan keuangan oleh manajemen perusahaan sehingga akan didapatkan laporan keuangan dengan kualitas yang tinggi (Said *et al.*, 2009).

Rouf (2011) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Said *et al.* (2009) dan Khan *et al.* (2013) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini disebabkan salah satu tugas komite audit adalah untuk memastikan keandalan laporan, sehingga manajemen perusahaan perlu untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Semakin besar ukuran komite audit, maka peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan semakin efektif (Iswandika *et al.*, 2014; Krisna dan Suhardianto, 2016). Hipotesis yang digunakan adalah:

H₃ : Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Konsentrasi Kepemilikan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Struktur kepemilikan saham akan memberikan gambaran mengenai distribusi kekuasaan dan pengaruh pemegang saham terhadap kegiatan operasional perusahaan. Struktur kepemilikan dapat dibedakan menjadi dua, kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Konsentrasi kepemilikan adalah suatu keadaan dimana sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki kepemilikan jumlah saham yang lebih dominan dibandingkan pemegang saham lainnya. Berbeda dengan struktur kepemilikan menyebar, dimana kepemilikan saham menyebar secara relatif merata ke publik, tidak ada yang memiliki saham lebih dominan dibandingkan dengan yang lain. Terdapat

dampak positif dan negatif dari besarnya kepemilikan saham oleh suatu pihak tertentu. Dampak positif, dengan meningkatnya hak atas aliran kas dari pemegang saham terbesar dalam suatu perusahaan, maka akan menimbulkan kualitas implementasi *corporate governance* yang semakin baik, yang kemudian pasar akan mengapresiasi, sehingga nilai perusahaan akan meningkat dan selanjutnya akan berdampak positif pada nilai saham para pemegang saham. Dampak negatif, dengan semakin terkonsentrasinya kepemilikan saham, maka pemegang saham terbesar akan lebih menguasai perusahaan dan semakin mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Para pemegang saham terbesar menganggap bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan keuangan menjadi tidak penting (Drobetz *et al.*, 2004). Sufian dan Zahan (2013) menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hipotesis yang digunakan adalah:

H₄ : Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kepemilikan Asing dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham perusahaan yang ada di Indonesia oleh pihak asing baik individu maupun lembaga. Menurut Indraswari dan Astika (2015), pihak asing lebih dianggap memperhatikan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti yang diketahui, negara-negara di Eropa sangat memperhatikan isu sosial seperti HAM, pendidikan, tenaga kerja, dan lingkungan. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak asing, maka mereka akan menjadi *stakeholder* atau pihak yang dianggap penting bagi perusahaan. Apabila suatu perusahaan memiliki suatu hubungan dengan *foreign stakeholder*, maka perusahaan akan lebih mengungkapkan tanggung jawab sosialnya (Barako *et al.*, 2006; Sriayu dan Mimba, 2013). Kepemilikan asing memiliki kemampuan

yang kuat untuk memantau pihak manajemen perusahaan melalui pengawasan yang ketat untuk menekan perilaku oportunistik pihak manajemen perusahaan. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh pihak asing dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan (Boediono, 2005). Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keuangan (Khan *et al.*, 2013). Permintaan pengungkapan sukarela semakin tinggi ketika semakin tinggi kepemilikan asing. Investor asing memiliki pengetahuan yang lebih luas sehingga lebih banyak menuntut perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi baik keuangan maupun non keuangan (Khan *et al.*, 2013).

Penelitian Haniffa dan Cooke (2005) menemukan hubungan positif antara kepemilikan asing dan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di negara Malaysia. Penelitian Khan *et al.* (2013) menemukan pengaruh positif kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di negara Bangladesh. Wang *et al.* (2013) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan proaktif dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk strategi legitimasi untuk mendapatkan pendanaan dari pihak asing dan memenuhi etika yang disyaratkan oleh pihak asing. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H₅ : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kepemilikan Publik dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kepemilikan merupakan fenomena yang lazim ditemukan di Negara dengan ekonomi berkembang seperti Indonesia. Kepemilikan publik yang terkonsentrasi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan karena pemegang

saham dengan mudah mengakses informasi perusahaan (Nuryaman, 2009). Perusahaan merasa tidak perlu mengungkapkan informasi terperinci dalam laporan keuangan karena *shareholder* dapat mengakses langsung informasi tanpa melalui laporan keuangan. Semakin besar kepemilikan publik, semakin besar informasi yang dibutuhkan. Hal ini menuntut, perusahaan untuk lebih banyak mengungkapkan informasi melalui laporan keuangan.

Kepemilikan publik adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam memperoleh perhatian masyarakat, perusahaan harus lebih terlibat langsung dalam aktivitas sosial. Semakin perusahaan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan CSR, maka masyarakat akan semakin terdorong untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut. Sriayu dan Mimba (2013), berpendapat bahwa semakin besar komposisi saham yang dimiliki publik, maka dapat memicu melakukan pengungkapan secara luas termasuk pengungkapan CSR untuk mempertahankan pemegang saham yang ada.

Beberapa penelitian telah menghubungkan antara kepemilikan publik dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Semakin besar kepemilikan publik semakin besar pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Nuryaman, 2009; Wang *et al.*, 2013). Khan *et al.* (2013) menemukan pengaruh positif kepemilikan publik terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Negara Bangladesh. Sriayu dan Mimba (2013) menunjukkan kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini disebabkan ada kekuatan dari publik yang menuntut perusahaan untuk mengungkapkan informasi perusahaan baik keuangan maupun non keuangan secara sukarela.

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H₆ : Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari berbagai macam aspek seperti total aset, total penjualan dan nilai pasar ekuitas. Perusahaan besar memiliki banyak tuntutan dari berbagai pihak stakeholder. Salah satunya masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam menjalankan kegiatan operasi, perusahaan dituntut untuk memperhatikan keadaan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Jangan sampai kegiatan operasi perusahaan mengganggu atau merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Rouf, 2011). Hasil penelitian ini juga didukung oleh Nurkhin (2010), Badjuri (2011), Santioso dan Chandra (2012), Kamil dan Herusetya (2012), Untoro dan Zulaikha (2013), Dewi dan Keni (2013), Laksmitaningrum dan Purwanto (2013), Sriayu dan Mimba (2013). Barako *et al.* (2006), Wijaya (2012), Setyorini dan Ishak (2012), Suttipun dan Stanton (2012), Dewi dan Priyadi (2013), Rofiqkoh dan Priyadi (2016), Krisna dan Suhardianto (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H₇ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Leverage dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Leverage merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pembiayaan aset perusahaan yang dibiayai oleh kreditur. Saat perusahaan memiliki hutang yang besar, timbul masalah antara pemegang saham dengan kreditur. Kreditur memerlukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai informasi untuk mengevaluasi risiko secara benar. Perusahaan tersebut akan menangani masalah itu

dengan cara meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosialnya (Arussi *et al.*, 2009).

Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) berarti sumber dana yang berasal dari pinjaman karena memiliki keuntungan potensial pemegang saham (Sjahrial, 2009). Perusahaan menggunakan *operating* dan *financial leverage* dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya, dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham. Sebaliknya jika perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih rendah maka akan menurunkan keuntungan pemegang saham.

Badjuri (2011), Santioso dan Chandra (2012), Dewi dan Keni (2013), Sriayu dan Mimba (2013), serta Laksmitaningrum dan Purwanto (2013) menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Untoro dan Zulaikha (2013) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi akan lebih memberikan informasi privasi mereka kepada kreditur, maka pengungkapan tanggung jawab sosialpun akan meningkat seiring dengan peningkatan *leverage* (Barako *et al.*, 2006). Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H₈ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Umur Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Umur perusahaan telah menjadi variabel yang sangat penting dalam banyak penelitian yang akan mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Delaney dan Huselid, 1996; Rettab *et al.*, 2009; Liu dan Anbumozhi, 2009). Delaney dan Huselid (1996) berpendapat bahwa perusahaan yang lebih tua memiliki lebih banyak informasi daripada perusahaan yang lebih muda, terutama dalam peng-

ungkapan CSR. Jadi, semakin tua umur perusahaan, semakin banyak pula pengungkapan CSR. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H₉ : Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Jenis Industri dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pengungkapan tanggung jawab dan aktivitas sosial perusahaan sangat dipengaruhi oleh jenis industri (Bayoud *et al.*, 2012). Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian, jenis industri yang berbeda akan mempengaruhi pengungkapan CSR yang berbeda juga. Pada umumnya, perusahaan manufaktur harus lebih memperhatikan tanggung jawabnya baik kepada masyarakat dan lingkungan alam terutama dalam bidang keamanan dan kesehatan, karena aktivitas dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dapat memberikan dampak negatif yang lebih besar daripada perusahaan lain. Selain itu, industri tertentu seperti perusahaan berorientasi pelanggan (*customer-oriented*) akan lebih memperhatikan tanggung jawab sosial mereka kepada komunitasnya untuk meningkatkan image dan keuntungan (Bayoud *et al.*, 2012). Dengan memperhatikan komunitas dan lingkungan sekitar, maka perusahaan akan melakukan kegiatan CSR lebih banyak. Jadi, jenis industri yang berbeda, akan mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR perusahaan tersebut. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H₁₀ : Jenis Industri berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Profitabilitas dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Profitabilitas menjadi perhatian utama dari para analis dan investor. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan perusahaan pada periode akuntansi. Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang

mencerminkan kemampuan entitas dalam menghasilkan laba yang semakin tinggi, pengungkapan tanggung jawab sosialnya juga akan meningkat (Kamil dan Herusetya, 2012; Setyorini dan Ishak, 2012).

Berdasarkan teori legitimasi ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi maka perusahaan tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi kesuksesan perusahaan (Untoro dan Zulaikha, 2013). Kamil dan Herusetya (2012) menyatakan profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan ekuitas. Salah satu alat untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah *Return on Equity* (ROE). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan berdasarkan modal.

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Rouf, 2011). Hasil penelitian ini didukung oleh Nurkhin (2010), Badjuri (2011), Santioso dan Chandra (2012), Dewi dan Keni (2013), Untoro dan Zulaikha (2013), Oktariani (2013). Sriayu dan Mimba (2013) tidak berhasil menemukan hubungan antara profitabilitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi juga dapat merasa bahwa pengungkapan tanggung jawab sosialnya tidak terlalu penting, berbeda dengan perusahaan yang berprofitabilitas rendah, perusahaan akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya untuk mempertahankan investor yang ada untuk tetap berinvestasi (Sembiring, 2005).

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H₁₁ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

METODE PENELITIAN

Sampel diambil dari perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2011 sampai

dengan 2014. Metode *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *judgement (purposive) sampling*. *Judgement (purposive) sampling* ini digunakan saat hanya terbatasnya jumlah atau kategori sampel yang memiliki informasi yang dicari (Sekaran dan Bougie, 2013). Berdasarkan *judgement (purposive) sampling*, maka kriteria pengambilan sampel yang dipilih adalah sebagai berikut (1) perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2014, (2) perusahaan non keuangan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan dengan akhir periode yang berakhir pada 31 Desember selama tahun 2011-2014, (3) perusahaan non keuangan yang menggunakan mata uang rupiah selama tahun 2011-2014, (4) perusahaan non keuangan yang memperoleh laba positif selama tahun 2011-2014. Berdasarkan proses pemilihan sampel diperoleh sebanyak 179 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 2011 sampai 2014.

Pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan CSR, sesuai dengan penelitian Ali dan Atan (2013) yang diadaptasi dari penelitian Haniffa dan Cooke (2005) dengan beberapa modifikasi dan tambahan beberapa atribut dari penelitian Othman *et al.* (2009). Indeks tersebut dikembangkan melalui *unweighted dichotomous score*, skor 1 bila perusahaan mengungkapkan butir tersebut dan skor 0 bila perusahaan tidak mengungkapkan butir tersebut. Dalam penelitian ini, maksimum pengungkapan *corporate social responsibility* adalah 45 atribut. Atribut tersebut harus mengandung pengungkapan *environmental, community involvement, human resources, dan product and services*.

Ukuran komisaris merupakan ukuran atau jumlah komisaris yang berada dalam perusahaan. Komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan (Sriayu dan Mimba, 2013). Variabel ini diukur dengan cara melihat jumlah komisaris yang ada dalam perusahaan (Ali dan Atan, 2013).

Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan perusahaan, dan tidak mewakili perusahaan. Variabel ini diukur dengan membagi jumlah komisaris non eksekutif dengan total jumlah dewan komisaris dalam perusahaan (Ali dan Atan, 2013). Komite audit diukur dengan menggunakan proksi jumlah keanggotaan komite audit (Iswandika *et al.*, 2014).

Konsentrasi kepemilikan adalah suatu keadaan dimana sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki kepemilikan jumlah saham yang lebih dominan dibandingkan pemegang saham lainnya. Variabel ini diukur dengan menggunakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham terbesar dengan total kepemilikan saham yang diterbitkan (Sari, 2013).

Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham perusahaan yang ada di Indonesia oleh pihak asing baik individu maupun lembaga. Variabel ini diukur dengan menggunakan persentase dari jumlah kepemilikan saham asing dengan jumlah lembar saham yang diterbitkan. Kepemilikan publik adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Variabel ini diukur dengan menggunakan presentase dari jumlah kepemilikan saham publik dengan jumlah lembar saham yang diterbitkan.

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan skala tertentu. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan *Log natural* dari total aset (Ali dan Atan, 2013). *Leverage* adalah penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan *return on owner's equity* (Pride *et al.*, 2011). Variabel ini diukur dengan cara membagi total utang dengan jumlah ekuitas (Sriayu dan Mimba, 2013). Umur perusahaan diukur dari umur perusahaan, yang menggunakan ukuran tahun dari perusahaan tersebut berdiri (Ali dan Atan, 2013). Jenis industri diukur

dengan memberikan skor 1 bila perusahaan tergolong ke dalam perusahaan manufaktur dan pertambangan, dan skor 0 bila perusahaan tidak tergolong ke dalam perusahaan manufaktur dan pertambangan (Bayoud *et al.*, 2012).

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan perusahaan pada periode akuntansi. Pengukuran profitabilitas disebut sebagai *Profitability Ratio*. *Profitability Ratio* berguna untuk mengukur *income* atau keberhasilan operasi dari perusahaan dalam periode tertentu (Weygandt *et al.*, 2011). Variabel ini diukur dengan menggunakan rasio *Return on Owner's Equity*. *Return on Owner's Equity* adalah rasio keuangan yang dihitung dengan mengkalkulasikan dengan membagi *net income after taxes* dengan *owner's equity* (Pride *et al.*, 2011).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil statistik deskriptif dan pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Statistika Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Devi	Minim um	Maxim um
CSRD	0,185604	0,1178247	0,0222	0,6222
BFSIZE	4,584058	2,2453385	2,0000	22,0000
NED	0,407990	0,1152676	0,1429	1,0000
UKAD	3,043478	0,4550884	1,0000	6,0000
CONCEN	0,508212	0,2144534	0,0716	0,9818
FOWN	0,216029	0,2728088	0,0000	0,9596
POWN	0,288477	0,1823740	0,0022	0,9229
SIZE	12,341058	0,7085309	10,2259	14,3730
DER	1,106155	1,1040888	0,0003	13,7148
AGE	30,772464	13,4823045	2,0000	93,0000
TYPE	0,239130	0,4268620	0,0000	1,0000
PROFIT	0,145403	0,1142614	0,0003	0,8423

Sumber: Hasil pengolahan data statistic

Hipotesis diterima ketika nilai signifikan di bawah 0,05 dan koefisien sesuai dengan arah hipotesis.

Tabel 2
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	B	T	Sig.
Konstanta	-0,685	-8,692	0,000
BSIZE	0,000	0,075	0,940
NED	-0,132	-3,769	0,000
UKAD	0,016	1,670	0,095
CONCEN	0,042	1,799	0,072
FOWN	0,011	0,700	0,484
POWN	0,075	2,580	0,010
SIZE	0,065	9,803	0,000
DER	0,004	1,197	0,232
AGE	0,000	0,597	0,551
TYPE	0,036	3,676	0,000
PROFIT	0,032	0,874	0,383

Sumber: Hasil pengolahan data statistic

Ukuran komisaris memiliki nilai signifikan sebesar 0,940. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, artinya H₁ tidak diterima. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Sembiring (2005) serta Untoro dan Zulaikha (2013) yang menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Komisaris independen memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 dan koefisien -0,132. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, artinya H₂ tidak diterima. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Rouf (2011), Santioso dan Chandra (2012), Khan *et al.* (2013) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Komisaris independen tidak terlalu memperhatikan kegiatan sosial perusahaan, tetapi hanya fokus pada penghematan biaya untuk memaksimalkan profitabilitas perusahaan, sehingga biaya untuk melakukan kegiatan sosial perusahaan akan berkurang. Semakin banyaknya komisaris independen dalam

perusahaan akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosialnya.

Komite audit memiliki nilai signifikan sebesar 0,095 dan koefisien 0,016. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, artinya H₃ diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Rouf (2011), Said *et al.* (2009) dan Khan *et al.* (2013) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Semakin banyak anggota komite audit dalam perusahaan, pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen juga akan meningkat dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin meningkat.

Konsentrasi kepemilikan memiliki nilai signifikan sebesar 0,072 dan koefisien 0,042. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, artinya H₄ diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sufian dan Zahan (2013) menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin meningkatnya hak atas aliran kas dari pemegang saham terbesar dalam suatu perusahaan, maka akan menimbulkan kualitas implementasi *corporate governance* yang semakin baik, sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan meningkat.

Kepemilikan asing memiliki nilai signifikan sebesar 0,484. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, artinya H₅ tidak diterima. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Haniffa dan Cooke (2005), Khan *et al.* (2013), Wanget *et al.* (2013) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kepemilikan publik memiliki nilai signifikan sebesar 0,010 dan koefisien 0,075. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan publik memiliki pe-

ngaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, artinya H_6 diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Nuryaman (2009), Wang *et al.* (2013), Khan *et al.* (2013), Sriayu dan Mimba (2013) menunjukkan kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang memiliki kepemilikan publik yang cukup besar dari kepemilikan yang lain, akan membuat perusahaan lebih memperhatikan aktivitas sosialnya. Umumnya aktivitas sosial perusahaan lebih terpaku kepada masyarakat. Semakin besarnya kepemilikan publik dalam perusahaan, semakin banyak pula aktivitas sosial perusahaannya.

Ukuran perusahaan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 dan koefisien 0,065. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, artinya H_7 diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Rouf (2011), Nurkhin (2010), Badjuri (2011), Santioso dan Chandra (2012), Kamil dan Herusetya (2012), Untoro dan Zulaikha (2013), Dewi dan Keni (2013), Laksmitaningrum dan Purwanto (2013), Sriayu dan Mimba (2013). Barako *et al.* (2006), Wijaya (2012), Setyorini dan Ishak (2012), Suttipun & Stanton (2012), Dewi dan Priyadi (2013), Rofiqkoh dan Priyadi (2016), Krisna dan Suhardianto (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Alasan adanya pengaruh tersebut dikarenakan perusahaan yang lebih besar lebih memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, sehingga informasi pengungkapan atas laporan keuangan juga akan semakin banyak yang akhirnya akan meningkatkan aktivitas atas tanggung jawab sosial perusahaan.

Leverage memiliki nilai signifikan sebesar 0,232. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, artinya H_8 tidak diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Badjuri (2011),

Santioso dan Chandra (2012), Dewi dan Keni (2013), Sriayu dan Mimba (2013), serta Laksmitaningrum dan Purwanto (2013) menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Umur perusahaan memiliki nilai signifikan sebesar 0,551. Hal ini menunjukkan bahwabahwa umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, artinya H_9 tidak diterima. Jenis industri memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 dan koefisien 0,036. Hal ini menunjukkan bahwa jenis industri memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, artinya H_{10} diterima. Perusahaan manufaktur lebih melakukan aktivitas perusahaan yang terkait dengan kesehatan dan keamanan, sehingga membuat perusahaan manufaktur lebih memperhatikan aktivitas tanggung jawab sosialnya.

Profitabilitas memiliki nilai signifikan sebesar 0,383. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, artinya H_{11} tidak diterima. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Rouf (2011), Nurkhin (2010), Badjuri (2011), Santioso dan Chandra (2012), Dewi dan Keni (2013), Untoro dan Zulaikha (2013), Oktariani (2013) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dapat diperoleh simpulan bahwa ukuran komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan publik, ukuran perusahaan dan jenis industri memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ukuran komisaris, kepemilikan asing, *leverage*, umur perusahaan dan profitabilitas tidak memiliki

pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah periode penelitian hanya 4 tahun, yaitu dari 2011 sampai 2014. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan periode penelitian agar hasil yang didapatkan menjadi lebih baik. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel-variabel independen lain, seperti likuiditas dan tingkat pertumbuhan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arussi, A., S., Selamat, M., H., dan Hanefah, M., M. 2009. Determinants of Financial and Environmental Disclosures through the Internet by Malaysian Companies. *Asian Review of Accounting* 17(1): 59-76. <https://doi.org/10.1108/13217340910956513>. Diakses tanggal 3 Januari 2017.
- Ali, M., A., M., dan Atan, R., H. 2013. The Relationship between Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure: A Case of High Malaysian Sustainability and Global Sustainability Companies. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics, and Law* 3(1): 39-48. <http://seajbel.com/wp-content/uploads/2014/01/KLB3145-M-ASRI-THE-RELATIONSHIP-BETWEEN-CORPORATE-GOVERNANCE-AND-CORPORATE-SOCIAL.pdf>. Diakses tanggal 3 Januari 2017.
- Badjuri, Achmad. 2011. Faktor-Faktor Fundamental, Mekanisme Corporate Governance, Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Manu faktor Dan Sumber Daya Alam Di Indonesia Corporate Governance Mechanism, Fundamental Factors, Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure Of A Natural Resource And Manufactur Company In Indonesian. *Dinamika Keuangan dan Perbankan* 3(1): 38-54.
- Barako, D., G., Hancock, P., dan Izan, H., Y. 2006. Factors Influencing Voluntary Corporate Disclosure by Kenyan Companies. *Corporate Governance* 14(2): 107-125. https://www.researchgate.net/profile/Phil_Hancock/publication/4745901_Factors_Influencing_Voluntary_Corporate_Disclosure_by_Kenyan_Companies/links/565582ad08ae4988a7b0b46e/Factors-Influencing-Voluntary-Corporate-Disclosure-by-Kenyan-Companies.pdf. Diakses tanggal 13 Januari 2017.
- Bayoud, N., S., Kavanagh, M., dan Geoff, S. 2012. Factors Influencing Levels of Corporate Social Responsibility Disclosure by Libyan Firms: Mixed Study. *International Journal of Economics and Finance* 4(4): 13-29. https://eprints.usq.edu.au/20970/4/Bayoud_Kavanagh_Slaughter_IJOEAF_2012_PV.pdf. Diakses tanggal 3 Januari 2017.
- Boediono, SB. Gideon. 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo, September*: 172-194.
- Burritt, R.L., dan Lehman, G. 1995. The body shop windfarm-an analysis of accountability and ethics. *The British Accounting Review* 27(3): 167-186.
- Delaney, J., T., dan Huselid, M., A. 1996. The Impact of Human Resource Management Practice on Perceptions of Organizational Performance. *Academy of Management Journal* 39(4): 949-969. <http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1360250186.6419human%20resource174.pdf>. Diakses tanggal 12 Januari 2017.
- Dewi, Sukmawati Safitri dan Maswar Patuh Priyadi. 2013. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 2(3): 1-20.
- Dewi, Sofia Prima dan Keni. 2013. Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap

- Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 15(1).
- Drobetz, W., Gugler, K. dan Simone, H. 2004. The Determinants of the German Corporate Governance Rating. WWZ Discussion Paper, No. 2004/06. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/123343/1/wp2004-06.pdf>. Diakses tanggal 3 Februari 2017.
- Garrison, Ray H., Eric W. Noreen, Peter C. Brewer, Nam Sang Cheng, Katherine C. K. Yuen. 2011. *Managerial Accounting an Asian Perspective*. McGraw-Hill. New York.
- Hackston, D. dan Milne, M., J. 1996. Some Determinants of Social and Environmental Disclosures in New Zealand Companies. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* 9(1): 77-108. https://www.researchgate.net/profile/Markus_Milne/publication/235323243_Some_Determinants_of_Social_and_Environmental_Disclosure_in_New_Zealand_Companies/links/561604e808aec6224411f7a3/Some-Determinants-of-Social-and-Environmental-Disclosure-in-New-Zealand-Companies.pdf. Diakses tanggal 13 Januari 2017.
- Haniffa, R., M. dan Cooke, T., E. 2005. The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy* 24: 391-430. https://www.researchgate.net/profile/Roszaini_Haniffa/publication/4962711_The_impact_of_culture_and_governance_on_corporate_social_reporting/links/5603dea608ae08d4f1718b68/The-impact-of-culture-and-governance-on-corporate-social-reporting.pdf. Diakses tanggal 2 Januari 2017.
- Hodgetts, Richard M., Fred Luthans dan Jonathan P. Doh. 2009. *International Management: Culture, Strategy, and Behavior* 6th Edition. McGraw-Hill. New York.
- Indraswari, G., A., D. dan Astika, I., B., P. 2015. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Saham Publik pada Pengungkapan CSR. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 11(1): 816-828. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/10604>. Diakses tanggal 2 Februari 2017.
- Iswandika, R., Murtanto & Sipayung, E. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan, Corporate Governance, dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Disclosure. *E-Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi* 1: 1-8.
- Jupe, R. 2005. Disclosures in Corporate Environmental Reports: A Test of Legitimacy Theory. *Working Paper*, No. 91. <https://core.ac.uk/download/pdf/10631384.pdf>. Diakses tanggal 2 Januari 2017.
- Kamil, A. dan Herusetya, A. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Kegiatan Corporate Social Responsibility Disclosures. *Media Riset Akuntansi* 2(1). http://journal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/article/viewFile/43/32. Diakses tanggal 10 Januari 2017.
- Khan, Arifur, Mohammad Badrul Muttakin dan Javed Siddiqui. 2013. Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy. *Journal Business Ethics* 114: 207-223.
- Krisna, A.D. dan Suhardianto. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 18(2): 119-128. doi: 10.9744/jak.18.2.119-128. Diakses tanggal 13 Januari 2017.
- Laksmitaningrum, C.F. dan Purwanto, A. 2013. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan CSR (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting* 2(3): 1-10.
- Lako, Andreas. 2011. *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

- Liu, Xianbing dan Anbumozhi, V. 2009. Determinant Factors of Corporate Environmental Information Disclosure: An Empirical Study of Chinese Listed Companies. *Journal of Cleaner Production* 17: 593-600. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.10.001>. Diakses tanggal 10 Februari 2017.
- Mcguire, J., Dow, S., dan Argheyd, K. 2003. CEO Incentives and Corporate Social Performance. *Journal of Business Ethics* 4: 341-359.
- Nurkhin, Ahmad. 2010. Corporate Governance dan Profitabilitas, Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan CSR Sosial Perusahaan. *Jurnal Dinamika Akuntansi* 2(1): 46-66.
- Nuryaman. 2009. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 6(1): Juni.
- Oktariani, Wulantika. 2013. Pengaruh Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas dan Umue Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Wahana Akuntansi Jurnal Ilmiah* 8(2).
- Othman, R., Thani, M., A. dan Ghani, E., K. 2009. Determinant of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-approved Companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies* 12(10): 1-17.
- Ponnu, C. H. dan Maurice, O., A, O. 2009. Corporate Social Responsibility Disclosure in Kenya: The Nairobi Stock Exchange. *African Journal of Business Management* 3(10): 601-608. <http://www.academicjournals.org/journal/AJBM/article-full-text-pdf/B6C757A18385>. Diakses tanggal 1 Februari 2017.
- Porter, M. E. dan M. R. Kramer. 2006. The link between competitive advantage and corporate social responsibility. *Harvard Business Review* 84(12): 78-92.
- Pride, W., M., Hughes, R., J., dan Kapoor, J., R. 2011. Introduction to Business 11th Edition. Cengage Learning. South-Western.
- Rahman, Arief dan Kurnia Nur Widyasari. 2008. The Analysis of Company Characteristic Influence Toward CSR Disclosure: Empirical Evidence of Manufacturing Companies Listed in JSX. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 12(1).
- Rahmatullah dan Trianita Kurniati. 2011. Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility). Cetakan Pertama. Yogyakarta.
- Rettab, B., Brik, B., A. dan Mellahi, K. 2009. A Study of Management Perceptions of the Impact of Corporate Social Responsibility on Organisational Performance in Emerging Economies: The Case of Dubai. *Journal of Business Ethics* 89(3): 371-390.
- Rofiqkoh, Esti dan Maswar Patuh Priyadi. 2016. Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(10): 1-18.
- Rouf, Md. Abdur. 2011. The Corporate Social Responsibility Disclosure: A Study of Listed Companies in Bangladesh. *Business and Economics Research Journal* 2(3): 1309-2448.
- Santioso, Linda dan Erline Chandra. 2012. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Umur Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 14(1).
- Said, Roshima, Yuserrie Hj Zainuddin dan Hasnah Haron. 2009. The Relationship between Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies. *Social Responsibility Journal* 5(2).
- Sari, F., J. 2013. Implementasi Enterprise Risk Management Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(2): 163-170.

- <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/1440>. Diakses tanggal 11 Februari 2017.
- Sari, R., A. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Nominal* 1(1): 124-140. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/1002>. Diakses tanggal 12 Februari 2017.
- Sekaran, U. dan Bougie, R. 2013. *Research Method for Business: A Skill-Building Approach*. 6th Edition. Wiley. Chicester.
- Sembiring, E., R. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo*: 379-395.
- Setyorini, T., C. dan Ishak, Z. 2012. Corporate Social and Environmental Disclosure: A Positive Accounting Theory View Point. *International Journal of Business and Social Science* 3(9): 152-164. http://www.ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_9_May_2012/17.pdf. Diakses tanggal 1 Februari 2017.
- Sjahrial, Dermawan. 2009. *Manajemen Keuangan*, Edisi 3. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Sriayu, G., A., P., W. dan Mimba, N., P., S., H. 2013. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 5(2): 326-344.
- Sudana, I Made dan Putu Ayu Arlindania W. 2011. Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Go-Public di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* 4(1).
- Sufian, M., A. dan Zahan, M. 2013. Ownership Structure and Corporate Social Responsibility Disclosure in Bangladesh. *International Journal of Economics and Financial Issues* 3(4):901-909. <http://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/viewFile/569/pdf>. Diakses tanggal 1 Februari 2017.
- Suttiapon, M. dan Stanton, P. 2012. Determinants of Environmental Disclosure in Thai Corporate Annual Reports. *International Journal of Accounting and Financial Reporting* 2(1): 99-115. <http://macrothink.org/journal/index.php/ijaf/article/viewFile/1458/1280>. Diakses tanggal 2 Februari 2017.
- Untoro, Dwi Arini dan Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting* 2(2): 2337-3806.
- Utami, Sri dan Sawitri Dwi Prastiti. 2011. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Social Disclosure. *Jurnal Ekonomi Bisnis* 16(1).
- Wang, Jianling, Lin Song dan Shujie Yao. 2013. The Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from China. *The Journal of applied Business Research* 2(6).
- Weygandt, J., J., Kimmel, P., D. dan Kieso, D., E. 2011. *Financial Accounting*. IFRS Edition. Wiley. United States.
- Wijaya, Maria. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 1(1): 26-30. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=113866&val=5211>. Diakses tanggal 2 Februari 2017.